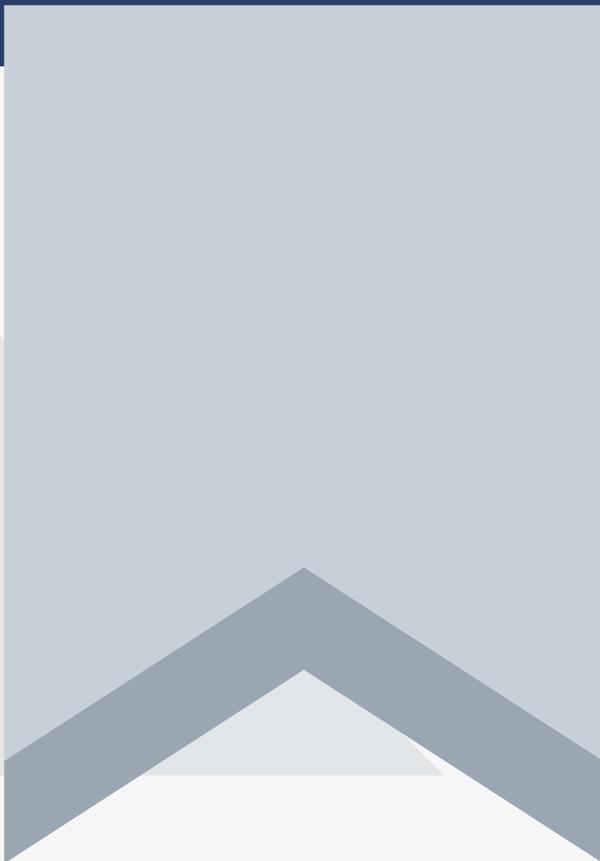




RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023



**TERBUKA ITU
HEBAT!** DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Sintang Tahun 2023 dapat diselesaikan. RENJA DISKOMINFO Kabupaten Sintang tahun 2023 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh ASN di DISKOMINFO Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Sintang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA DISKOMINFO Kabupaten Sintang tahun 2023 ini, diucapkan terima kasih.

Sintang, Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19740323 199803 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	4

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3.	Program dan Kegiatan	32

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43**BAB V : PENUTUP** 47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sintang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Komunikasi Dan Informatika, dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan dan dinamika kelembagaan maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 063 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Sintang. Merujuk pada SOTK Dinas Kominfo Kabupaten Sintang yang tertera di Peraturan Bupati Sintang nomor Nomor 063 Tahun 2019, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan informasi publik sebagai PPID Utama, melaksanakan komunikasi publik untuk mengembangkan citra dan reputasi pemerintah daerah yang baik serta mengelola aplikasi informasi pemerintah daerah berbasis teknologi informatika (*E-Government*). Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi bagian dari kekuatan terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka di Kabupaten Sintang.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Visi Bupati Sintang, dalam Pembangunan Kabupaten Sintang Berkelanjutan yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2022”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang, diemban 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan Pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.



3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Diskominfo Kabupaten Sintang merujuk pada Misi **Ketiga** yaitu terkait dengan Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan ekonomi dan sumber daya daerah.

Sedangkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP
7. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
17. Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
18. Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman dan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi



19. Perda No 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2021
20. Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 063 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun tentang Penetapan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan Rencana Kegiatan Tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022. Adapun Tujuan disusunnya renja tahun 2022 adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

1. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Sekretariat Dinas Kominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan yaitu: Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; Pengelolaan kearsipan, kerumahtangaan dan perlengkapan OPD; Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran; Pengelolaan administrasi keuangan; Pembinaan Satuan Pemegang Kas; Penyusunan rencana dan program kerja lingkup OPD; Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi; dan Penyusunan laporan kegiatan Dinas.

Di Sekretariat Dinas Kominfo juga mengelola belanja tidak langsung. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 3.804.435.336,00. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di sekretariat Dinas Kominfo meliputi Penyusunan DUK dan Nominatif Pegawai Tahun 2021; Menyiapkan dan membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tahun 2021; Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2021; dan Menyiapkan SKUM PTK pegawai Tahun 2021.

Pelaksanaan Pengelolaan Kerumah Tanggaan di Sekretariat Dinas Kominfo meliputi Permohonan perlengkapan administrasi operasional Dinas; Pembuatan daftar inventaris Dinas; Pengadaan perlengkapan kebutuhan pegawai dan Dinas; Menyusun RKBU, RTBU dan Pengadaan barang lingkup Dinas. Adapun pelaksanaan pengevaluasian, monitoring, perencanaan dan pelaporan di Sekretariat Dinas Kominfo meliputi Penyusunan Laporan



Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), LKPJ- AMJ; Laporan Triwulan, Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Kominfo; dan Mengkoordinir Penyusunan Renstra Dinas Kominfo dan Hasil Musrenbang.

2. Bidang-Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Bidang-Bidang di Dinas Kominfo mengelola program dan kegiatan di belanja langsung tahun 2021 sebagai berikut :

No	Bidang	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Sekretariat (Sub Bagian Aparatur dan Umum)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.804.435.336,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	57.750.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.159.400,00
2.	Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	407.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.859.500,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	887.000,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.882.446,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.923.300,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.236.000,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.460.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.800.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.290.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.210.000,00



2.	Informasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9.273.000,00
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	135.699.500,00
		Pelayanan Informasi Publik	41.718.000,00
3.	Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	27.755.000,00
		Layanan Hubungan Media	2.152.610.000,00
		Penguat Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	17.914.700,00
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	43.655.600,00
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00
4.	Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	45.178.000,00
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	37.320.000,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	16.700.000,00
5.	E-Government, Persandian dan Statistik	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.240.000,00
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	91.444.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9.887.000,00
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.594.000,00
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.151.000,00
JUMLAH TOTAL			7.773.139.782,00

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mendukung pencapaian sasaran Daerah “Peningkatan Infrastruktur Dasar, SDM dan Ekonomi Kerakyatan di dukung dengan Keterbukaan



Pemerintah menuju Sintang Berkelanjutan”

Pada Tahun 2021 Pagu Awal yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sesuai dengan DPPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.364.990.857,- dengan rincian Belanja Modal Rp. 95.302.500,- , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.340.783.848,- dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.928.904.473,-. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) kali rasionalisasi Anggaran dengan total Rasionalisasi adalah sebesar Rp. 791.851.075,- (18,24 % dari total Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021) sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi sebesar Rp. 3.642.196.946,-. Jadi sisa pagu Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 7.573.139.782,-. Pada Bulan Oktober Tahun 2021 ada penambahan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rincian untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 119.210.000,-, untuk penambahan biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 29.290.000,-, untuk biayan penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 19.000.000,-, dan untuk biaya penambahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 32.500.000,-. Sehingga pagu akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2021 sebesar Rp. 7.773.139.782,-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 sebesar Rp. 7.773.139.782,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 7.410.337.978,-

Rasio realisasi Anggaran sebesar 95,33 % dari pagu anggaran.



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Sintang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Lembar :

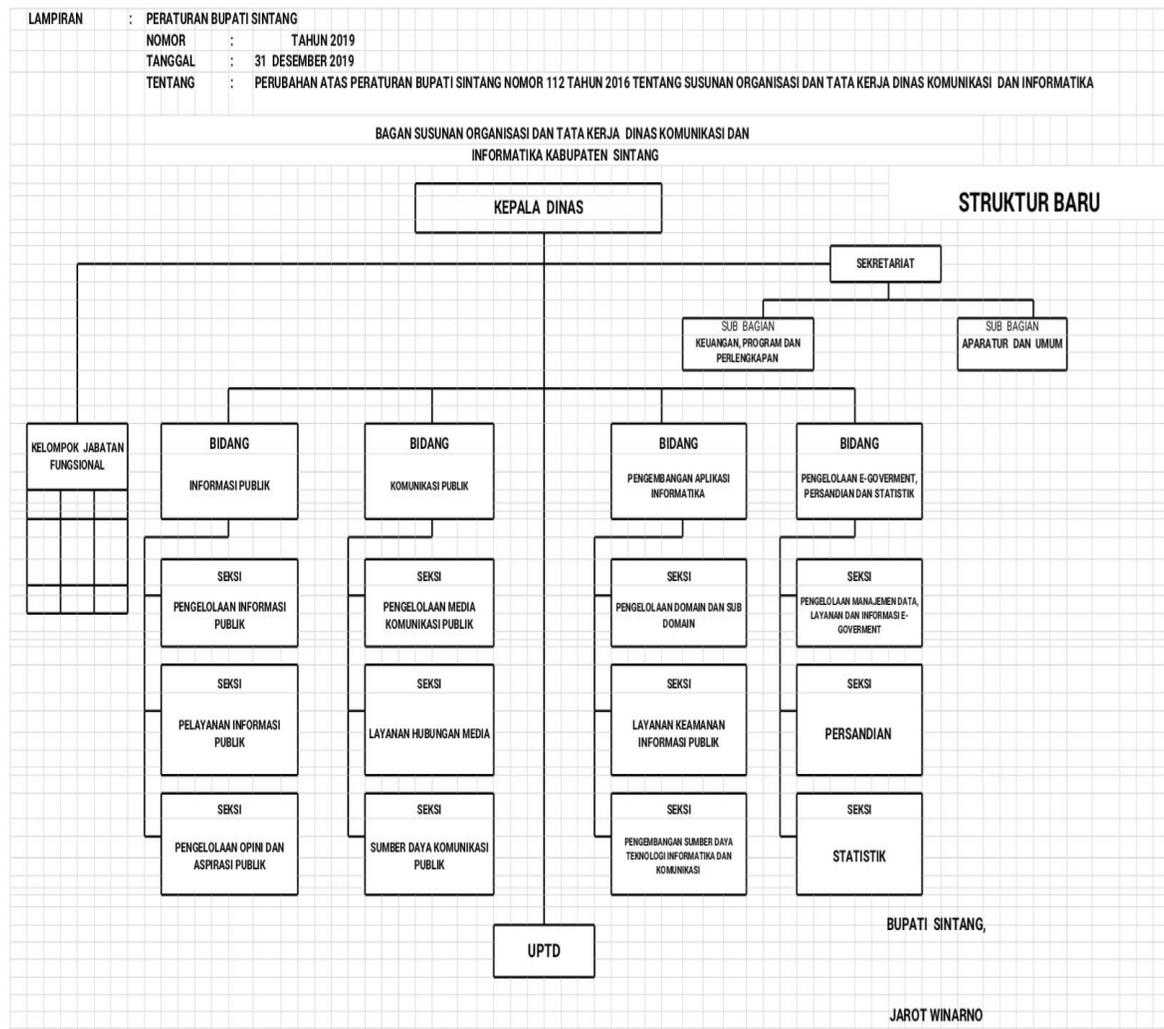
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluhan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		Ket.				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12				
X	XX	01													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
X	XX	01	2.01												
PERENCANAAN DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH															
			03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dok Lakip	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	0%	-	-		Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
			04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	ke 14 kecamatan	81 kali	-	75 kali	81 kali	78 kali	58%	135 kali	135 kali		
			05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok Laporan Barang	1 Buku	-	1 Buku	-	-	0%	-	-		Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor
X	XX	01	2.02												
ADMINISTRASI KEUANGAN															
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tenaga kontrak	26 orang	39 orang	26 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	38 orang		Penyediaan tenaga kontrak
					Jaminan Kesehatan	26 orang	39 orang	26 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	38 orang		
					Jaminan Kematian	26 orang	39 orang	26 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	38 orang		
					Jaminan keselamatan	26 orang	39 orang	26 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	38 orang		
			06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan RfK	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	-	0%	-	-		Penataan dokumen arsip, Penataan Aset, penyusunan laporan akhir tahun
			07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Bulanan	3 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	-	-	0%	-	-		
			09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	LAT	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	-	-	0%	-	-		
X	XX	01	2.03												
ADMINISTRASI UMUM															
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	perangko	20 lembar	-	20 lembar	-	-	0%	-	-		
					paket pengiriman	40 kali	-	40 kali	-	-	0%	-	-		
					matrai 10.000	-	100 Lembar	-	-	-	0%	200 lembar	200 lembar		
					matrai 6.000	-	-	-	140 lembar	140 lembar	0%	-	-		
					matrai 3.000	-	-	-	50 lembar	50 lembar	0%	-	-		

2	16	02	2.01			PPID	5 OPD		-	5 OPD	3 OPD	60%	10 OPD	10 OPD		
						pameran pembangunan	1 kegiatan		-	-	-	0%	-	-		
						HUT RI	1 kegiatan		-	-	-	0%	-	-		
						Harkitnas	1 kegiatan		-	-	-	0%	-	-		
				06	Pelayanan Informasi Publik											Pengelolaan PPIID Utama dan PPIID Pembantu Kabupaten Sintang, Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Pameran Pembangunan
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rakor	30 orang		20 orang	70 orang	-	0%	50 orang	50 orang		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	KIM	3 kelompok		1 kelompok	5 kelompok	1 kelompok	20%	5 kelompok	5 kelompok		Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota											
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	website	2 website		1 website	2 website	1 website	50%	2 website	2 website		Pemeliharaan Website Sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id
					Penyediaan Informasi terkait Covid-19	website	1 website		1 website	-	-	0%	-	-		
2	16	03	2.02		Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota											
2	16	03	2.01	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E government dalam penyelenggaraan	Pengawasan E-Gov	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan		Penyelenggaraan E-Government Kecamatan se Kabupaten Sintang, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah

2	16	03	2.01	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Menarat BTS	30 Menara		28 Menara	40 menara	20 menara	67%	44 menara	44 menara		
2	16	03	2.01	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Wifi / Hotspot	10 titik		8 titik	8 titik	8 titik	80%	8 titik	8 titik		
2	16	03	2.01	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Aplikasi SIBEJI	1 Aplikasi		1 Aplikasi	-	-	0%	-	-		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Buku Statistik Sektoral	1 buku		1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	1 buku		Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Sektoral
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
2	21	02	2.01	01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasional jaringan sandi pemerintah	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan		Pemeliharaan Peralatan Radio Kecamatan, Pengelolaan dan Pengembangan Persandian

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandiaan. Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Jabatan, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.



Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini setiap daerah otonom termasuk Kabupaten Sintang dituntut mampu mewujudkan pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu upayanya adalah menggunakan atau memanfaatkan



teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan Umum yaitu :

Namun upaya mewujudkan *good governance* yang ditopang *e-Government* bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah. Terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Kominfo masih sangat terbatas.
2. Upaya perbaikan tata kelola dan sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika masih minim.
3. Penguatan PPID utama untuk mendukung pelayanan informasi masih belum maksimal.
4. Minimnya penyediaan sarana dan membangun proses komunikasi publik yang berkualitas.
5. Akses jaringan telekomunikasi dan internet di berbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah.
6. Belum maksimalnya menciptakan internet desa (Ides) mendukung terwujudnya desa mandiri.
7. Belum dilakukan pengadaan jaringan intra Pemerintah Daerah.
8. Minimnya upaya edukasi literasi media kepada kelompok masyarakat.
9. Belum dilakukan fasilitasi pembentukan KIM.
10. Belum dilakukan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik.
11. Belum maksimalnya penyusunan regulasi daerah tentang urusan Kominfo.

Selain permasalahan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang juga dihadapkan berbagai tantangan yang semakin besar dan kompleks sebagai berikut:

1. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam membuat program Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia. Pemilihan Kabupaten atau Kota berdasarkan beberapa parameter dan diantaranya menyangkut urusan Kominfo. Oleh karenanya Kabupaten Sintang harus berupaya masuk dalam gerakan *Smart City* Indonesia tersebut.
2. Guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konkritnya yaitu menyiapkan sebuah portal data pemerintahan daerah yang memuat seluruh data kecamatan se-Kabupaten Sintang dan bisa diakses oleh instansi pemerintah sendiri maupun publik.



3. Hadirnya kebijakan satu data melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.”
4. Maraknya penyebaran hoax dan perbuatan *cyber crime* melalui kemajuan teknologi informasi.



1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan Informasi dan Teknologi di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relative masih rendah dan perlu ditingkatkan;
2. Upaya perbaikan tata kelola dan sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum memadai
3. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Penguatan PPID utama untuk mendukung pelayanan informasi masih belum maksimal.
6. Akses jaringan telekomunikasi dan internet di berbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah (Blank Spot).
7. Belum maksimalnya menciptakan internet desa (Ides) mendukung terwujudnya desa mandiri.
8. Belum dilakukan pengadaan jaringan intra Pemerintah Daerah.
9. Minimnya upaya edukasi literasi media kepada kelompok masyarakat.
10. Belum dilakukan fasilitasi pembentukan KIM.
11. Belum dilakukan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik.
12. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam
13. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi perbukitan dan dengan sebaran penduduk yang tidak merata;
14. Belum maksimalnya penyusunan regulasi daerah tentang urusan Kominfo.

Selain permasalahan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang juga dihadapkan berbagai tantangan yang semakin besar dan kompleks sebagai berikut:

1. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam membuat program Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia. Pemilihan Kabupaten atau Kota berdasarkan beberapa parameter dan diantaranya menyangkut urusan Kominfo. Oleh karenanya Kabupaten Sintang harus berupaya masuk dalam gerakan *Smart City* Indonesia tersebut.



2. Guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konkritnya yaitu menyiapkan sebuah portal data pemerintahan daerah yang memuat seluruh data kecamatan se-Kabupaten Sintang dan bisa diakses oleh instansi pemerintah sendiri maupun publik.
3. Hadirnya kebijakan satu data melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.”
4. Maraknya penyebaran hoax dan perbuatan *cyber crime* melalui kemajuan teknologi informasi.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Sintang.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sintang, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Kabupaten Sintang yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e- Government sebagai wujud Kinerja Pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Sintang. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Sintang.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika



Kabupaten Sintang dari sisi internal antara lain:

1. Dukungan kebijakan pemerintah cukup baik;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai *stakeholder* cukup tinggi dan terbuka;
3. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi;
5. Kesadaran akan pentingnya data, informasi dan statistik yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengembangan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “entry point” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

1. Sarana komunikasi dan desiminasi informasi belum optimal.

Sejalan dengan Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Sintang, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Sintang. Demikian halnya dengan Diskominfo sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kabupaten Sintang, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dan akan dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana komunikasi dan desiminasi informasi belum optimal. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Diskominfo Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang “*Peningkatan Infrastruktur Dasar, SDM dan Ekonomi Kerakyatan di dukung dengan Keterbukaan Pemerintah menuju Sintang Berkelanjutan*” memiliki tanggung jawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, dukungan ketersediaan perangkat dan sistem pengintegrasian data dan



informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tentunya optimalisasi diseminasi informasi akan tercapai.

2. Informasi publik belum menyentuh masyarakat secara merata.

Komunikasi dan informatika merupakan kegiatan pelayanan transformasi, merupakan jaringan yang penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping mempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta anggota masyarakat. Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta melaksanakan yang diamanatkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas.

Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang kurang memadai sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Sintang khususnya di daerah Pedalaman dan perbatasan.

Dengan peningkatan infrastruktur yang memadai diharapkan masyarakat akan semakin semangat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, sehingga penerapan dari visi dan misi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

4. Peningkatan kompetensi aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan aparatur yang mengelola bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Pada dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Namun demikian untuk perencanaan perubahan Anggaran Tahun 2023 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dan hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang.

Dalam dokumen rancangan awal RKPD Tahun 2023 disebutkan tema pembangunan daerah yang diusung adalah:

“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR, MUTU PELAYANAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS MENUJU SINTANG YANG INOVATIF, MAJU DAN LESTARI”

Dari tema RKPD tersebut, dapat dipahami bahwa tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sangat terkait dengan istilah “keterbukaan pemerintahan”. Isu pemerintahan yang terbuka (*open government*) menjadi isu utama dalam dinamika pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan *open government* merupakan konsepsi yang berpengaruh besar dalam mewujudkan *good government*. Selain dianggap adaptif dengan jiwa jaman digitalisasi yang sedang berlangsung, karakter pemerintah terbuka membawa publik pada ruang yang terang benderang, sehingga segala hal diketahui dan terklarifikasi tuntas oleh banyak pihak. Maka dari itu, upaya menghadirkan perilaku pemerintahan yang terbuka, akan mampu mendorong berkembangnya nilai dan prinsip partisipasi, kontrol sosial dan akutabilitas pemerintahan menjadi semakin baik dan optimal. Urusan pemerintahan yang paling dekat dan sangat terkait secara fungsional dengan upaya mewujudkan pemerintahan terbuka adalah urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam UU 23 Tahun 2014, urusan Kominfo masuk pada kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karenanya, upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka harus diawali dengan penyelenggaraan urusan Kominfo yang baik, fokus dan optimal.

Penyelenggaraan urusan Kominfo di Kabupaten Sintang merupakan salah satu isu penting didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut.



Pertama; Urusan Kominfo menjadi garda terdepan bagi pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan era digitaisasi yang semakin masif. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 64,8% dari total penduduk (AIPP, 2019) selain itu, amanat UUD 1945 Pasal 28F menegaskan bahwa *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Kedua; Kabupaten Sintang dengan luas 21.365 km² yang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat, secara geografis memiliki tantangan komunikasi yang berat guna memperlancar mobilitas orang, barang dan informasi. Hal ini membawa implikasi dibutuhkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang handal, berkualitas dan menyeluruh sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal sesuai amanat pasal 28F UUD 1945.

Ketiga; harus dipahami bahwa keterbukaan pemerintah selalu berawal dari keterbukaan informasi publik. Implikasinya, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus menjadi sangat penting. implementasi UU KIP oleh Pemda berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, karena pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) berada di domain kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Keempat; penyelenggaraan urusan Kominfo menjadi salah satu urusan yang memberi kontribusi terhadap PAD melalui retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Oleh karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika adalah diantara pilar mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Sintang dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan empat argumentasi tersebut, maka peran Dinas Komunikasi dan Informatika harus dioptimalkan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka.



Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Sintang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2											
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFIRMATIKA					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFIRMATIKA					
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan RFK		12 Laporan	Rp 1,499,970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun		1 Laporan	Rp 2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			12 Laporan	Rp 2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Rp 1,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
2.16.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					
2.16.01.2.04.05	Pengelolaan Data Retribusi					Pengelolaan Data Retribusi					
2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi					
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5 Jenis	Rp 1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Rp 47,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik				Rp 45,000,000	Penyediaan Bahan Logistik					
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Rp 10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Majalah				
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah		40 Kali	Rp 45,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah				

2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Mobil Operasional Kepala Dinas (Innova)		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kendaraan Lapangan		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Gedung Kantor Diskominfo		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp 1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik , Wifi dan Air	12 Bulan		Rp 155,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Listrik , Wifi dan Air		
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 2,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kontrak	39 Orang		Rp 706,216,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tenaga Kontrak		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp 10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Rp 26,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Pemantauan dan Penilaian pemuatan konten media komunikasi publik berdasarkan waktu dan frekuensi	100%			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			Pemantauan dan Penilaian pemuatan konten media komunikasi publik berdasarkan waktu dan frekuensi		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pelaksanaan dan pengendalian Command Center Pemerintah Daerah	100%			Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Pelaksanaan dan pengendalian Command Center Pemerintah Daerah		
		Pelaksanaan dan pengendalian layanan media videotron	3 Unit						Pelaksanaan dan pengendalian layanan media videotron		
		Koordinasi dan konsultasi peningkatan Bidang Komunikasi Publik	100%						Koordinasi dan konsultasi peningkatan Bidang Komunikasi Publik		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik					Pelayanan Informasi Publik					
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Hubungan dengan Media	20 Media			Layanan Hubungan Media			Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Hubungan dengan Media		
		Terlaksananya konfrensi pers, pertemuan dengan media online dan liputan media online	10 Kali						Terlaksananya konfrensi pers, pertemuan dengan media online dan liputan media online		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan engan pemangku Kepentingan					Kemitraan engan pemangku Kepentingan					
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik untuk SKPD	30 SKPD			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik untuk SKPD		
		Terselenggaranya sosialisasi literasi/pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi	30 Orang						Terselenggaranya sosialisasi literasi/pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	10 Kelompok			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Media Luar Ruang (Videotrone)	3 Unit			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pemeliharaan Media Luar Ruang (Videotrone)		

			Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruang (Balihw Permanen)	1 Unit			Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruang (Balihw Permanen)			
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Pemeliharaan Rutin/berkala Website sintang.go.id				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
			Pengadaan Server Website sintang.go.id				Pengadaan Server Website sintang.go.id			
			Sosialisasi penggunaan web dan email Dommaindan Sub Domain sintang.go.id				Sosialisasi penggunaan web dan email Dommaindan Sub Domain sintang.go.id			
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik			
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS) milik Provider Swasta yang berada dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	128 Menara			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS) milik Provider Swasta yang berada dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang		
			Jumlah infrastruktur Menara Telekomunikasi BTS-USO BAKTI Kementerian Kominfo yang berada dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	44 Menara				Jumlah infrastruktur Menara Telekomunikasi BTS-USO BAKTI Kementerian Kominfo yang berada dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang		
			Laporan Pelaksanaan Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS) sebagai penunjang layanan Pemerintah di Kabupaten Sintang	1 Dokumen				Laporan Pelaksanaan Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS) sebagai penunjang layanan Pemerintah di Kabupaten Sintang		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	100%			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah		
			Pendampingan aksesibilitas jaringan internet publik	100%				Pendampingan aksesibilitas jaringan internet publik		
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)						Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
2.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN						URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.21.02.2.01.05	Penetapan Pola Hubung Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					Penetapan Pola Hubung Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.21.02.2.01.06	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					
	JUMLAH				Rp 1,106,216,770	JUMLAH					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, diperoleh usulan dari masyarakat yang berkaitan di bidang Komunikasi dan Informatika yang telah dituangkan kedalam SIPD (Sistem PInformasi Pembangunan Daerah Tahun 2023). Adapun usulan dari Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah usulan pendirian menara telekomunikasi di Desa.



Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sintang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Aplikasi Informatika				
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kecamatan Sepauk			
		Desa Limau Bakti	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Nanga Pari	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Tamawang Matai	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Sungai Sengak	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Tanjung Mawang	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Kelam Permai			
		Desa Kelam Sejahtera	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Jerora Satu	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Sungai Labi	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Binjai Hulu	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Simba Raya	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Sintang			
		Desa Tanjung Kelansam	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Tertung	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Mungguk Bantok	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	

		Desa Mail Jampang	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Dedai			
		Desa Riguk	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Jangkang	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Penyak Lalang	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Kumpang	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Pengkadan Sungai Rupa	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Apin Baru	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Ketungau Tengah			
		Desa Kayu Dujung	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Landau Buaya	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Ketungau Hilir			
		Desa Jentawang Hilir	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Mungguk Kelapa	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Ratu Damai	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Ketungau Tengah			
		Desa Radin Jayaa	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Padung Kumang	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Bagelang Jaya	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Sungai tebelian			
		Desa Rarai	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Ambalau			
		Desa Deme	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Desa Tanjung Andar	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	
		Kecamatan Ketungau Hulu			
		Desa Empura	Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS)	1 Unit	

2	Program Aplikasi Informatika				
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kecamatan Sepauk			
		Desa Nanga Sepauk	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	
		Desa Sukau Bersatu	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	
		Kecamatan Kelam Permai			
		Desa Merpak	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	
		Kecamatan Sintang			
		Desa Mungguk Bantok	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	
		Kecamatan Ambalau			
		Desa Riam Sabon	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	
		Desa Dahtah Bungai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	
		Desa Buntut Sabon	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang harus merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang kominfo masih merupakan prioritas nasional sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prsarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden. Adapun visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah : **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2015-2019, pembangunan



bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan di prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan SDM dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi :

- 1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- 2 Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- 3 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- 4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Dinas komunikasi dan Informatika berperan dalam pencapaian visi Kepala daerah melalui misi ke empat, yaitu “*Peningkatan Infrastruktur Dasar, SDM dan Ekonomi Kerakyatan di dukung dengan Keterbukaan Pemerintah menuju Sintang Berkelanjutan*”

Visi dan Misi Diskominfo dijabarkan dalam berbagai program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang mendukung pencapaian sasaran dan



tujuan RPJMD. Program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
7. Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
9. Program Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika
10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
11. Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Persandian)
12. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sintang melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut :

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target



kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun rumusan program dan kegiatan perangkat daerah Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	16									0								100,000,000
2	16	01								0								0
2	16	01	2.01							0								0
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	
2	16	01	2.02							0								0
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Laporan		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	
2	16	01	2.06							0								0
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Bahan Komputer	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Jenis 4 Jenis		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cleaning Service		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Orang		0				0		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		BBM Makan Minum Rapat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Liter 330 Kotak		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bahan Cetak		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Laporan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0				0		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0				0		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Kendaraan Operasional		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								0				100,000,000			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								0				100,000,000			
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								0				0			
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000			
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Literasi Digital/Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi Publik Jumlah Peserta Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya						0				0			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas							0			0
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							0			0
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					0				0	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0				0	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	laporan kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala Wbsite sintang.go.id Pengadaan Server Website sintang.go.id Sosialisasi penggunaan web dan email Domain dan Sub Domain sintang.go.id	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0			0
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0				0	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0			0
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						0			0

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2023 berjumlah Rp. 1.106.216.770,- (Satu Miliar Seratus Enam juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian dapat dilihat pada tabel yang terlampir pada dokumen ini.



Tabel IV
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
				2															
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
X	XX	01	2.01	PERENCANAAN DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH															
			03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dok Lakip	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		
			04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	ke 14 kecamatan	81 kali	64,305,000	81 kali	53,090,000	81 kali	-	81 kali	-	81 kali	-	81 kali	-		
			05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok Laporan Barang/Inventaris	1 Buku	3,500,000	1 Buku	-	1 Buku	-	1 Buku	-	1 Buku	-	1 Buku	-		
X	XX	01	2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN															
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tenaga kontrak	26 orang	455,175,000	26 orang	706,216,800	41 Orang	706,216,800	26 orang	706,216,800	26 orang	706,216,800	26 orang	706,216,800		
					Jaminan Kesehatan	26 orang			41 Orang		26 orang		26 orang		26 orang				
					Jaminan Kematian	26 orang			41 Orang		26 orang		26 orang		26 orang				
					Jaminan keselamatan	26 orang			41 Orang		26 orang		26 orang		26 orang				
			06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan RfK	12 Dokumen	4,500,000	12 Dokumen	1,499,970	12 Dokumen	1,537,469	12 Dokumen	1,575,906	12 Dokumen	1,615,304	12 Dokumen	1,655,686		
			07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Bulanan	3 Laporan	11,100,000	3 Laporan	2,000,000	3 Laporan	2,050,000	3 Laporan	2,101,250	3 Laporan	2,153,781	3 Laporan	2,207,626		
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan				1 Laporan	1,000,000									
			09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	LAT	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,050,000	1 Dokumen	2,101,250	1 Dokumen	2,153,781	1 Dokumen	2,207,626		
X	XX	01	2.03	ADMINISTRASI UMUM															
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	perangko	20 lembar	1,100,000	20 lembar	2,000,000	1,000,000	20 lembar	1,025,000	20 lembar	1,050,625	20 lembar	1,076,891	20 lembar	1,103,813	
					paket pengiriman	40 kali		40 kali			40 kali		40 kali		40 kali				
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	belanja telepon/faksimili/radio	17 unit	75,760,000	17 unit	101,600,000	17 unit	155,000,000	17 unit	158,875,000	17 unit	162,846,875	17 unit	166,918,047	17 unit	171,090,998
					PDAM	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
					Listrik	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
					Internet	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2,500,000										
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan bermotor	1 tahun	4,500,000	1 tahun	40,475,000	26,500,000	1 tahun		1 tahun		1 tahun				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Jabatan					10,000,000										
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Buku Cek	3 buku	9,750,000	3 buku	-	3 buku	-	3 buku	-	3 buku	-	3 buku	-		
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Tenaga Kebersihan	3 orang	63,000,000	3 orang	887,000	3 orang	-	3 orang	-	3 orang	-	3 orang	-		
			10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	31 jenis	22,261,800	31 jenis	11,695,000	31 jenis	-	31 jenis	-	31 jenis	-	31 jenis	-		
					perlengkapan komputer	3 jenis		3 jenis	38,445,000	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-		
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	photocopy	10,000 lembar	3,300,000	10,000 lembar	1,250,000	10,000 lembar	10,250,000	10,000 lembar	10,506,250	10,000 lembar	10,768,906	10,000 lembar	11,038,129		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar	2 jenis	5,400,000	2 jenis	31,320,000	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-		
			16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BBM	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,912,000	45,000,000	1 tahun	46,125,000	1 tahun	47,278,125	1 tahun	48,460,078	1 tahun	49,671,580	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat	550 kotak	6,325,000	550 kotak	7,500,000	550 kotak	-	550 kotak	-	550 kotak	-	550 kotak	-		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ke provinsi	39 kali	122,672,700	39 kali	65,650,000	45,000,000	39 kali	46,125,000	39 kali	47,278,125	39 kali	48,460,078	39 kali	49,671,580	
					ke luar provinsi	32 kali		32 kali		32 kali	-	32 kali	-	32 kali	-	32 kali	-		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					47,500,000										

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2023 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfo dapat melaksanakannya.

Sintang, Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19740323 199803 1 005

